

PELAJARAN PENTING DALAM MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Leonard Tasuno Laiya

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: leotpres@gmail.com)

Tundjung Harning Sitabuana

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

During the New Order era he (often abbreviated as New Order) was the term for the reign of President Soeharto in Indonesia. The New Order was founded by the Old Order, which refers to the era of Soekarno's government. As we know, this new order era occurred after the destruction of the old order and before the formation of the reform order until now. The birth of the New Order began with the issuance of an Order on March 11, 1966. The New Order lasted from 1966 to 1998. At that time he appointed Sukarno as the first President of the Republic of Indonesia. The transfer of office occurred in 1966, with the replacement of the old order which referred to the era of President Soekarno's administration. Which has stepped down since the G30S PKI incident emerged. In this article, we will discuss the history of the old order from the beginning of its formation to the formation of the next period, namely the new order. In this article we will also discuss the history of the new order and other important events, and will also discuss the history of the reformation era, namely the period when the new order was destroyed and replaced by a new period, namely the reform era that has been in effect until now.

Keywords: *The New Order Government Concept, The Arrival of G30S PKI, Reformation Era.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara

angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Seperti diketahui, Indonesia telah mengalami tiga masa atau era pemerintahan setelah kemerdekaan, yakni Orde Lama (1945-1966), Orde Baru (1966-1998), serta era Reformasi dan setelahnya (1998-sekarang).

Periodisasi Orde Lama tersebut dapat diperjelas sebagai masa setelah kemerdekaan RI (1945-1950), masa setelah pengakuan kedaulatan (1950-1959), serta masa akhir kepemimpinan Soekarno (1959-1966).

1. Masa Setelah Kemerdekaan RI (1945-1950)

Sejak Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang terjadi setelahnya adalah hiruk-pikuk politik dan keamanan seiring masuknya kembali Belanda ke wilayah Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Soekarno pula Pancasila dibentuk dan digodok. Tak hanya dasar negara, bentuk pemerintahan juga birokrasi di dalamnya juga dirumuskan. Pembentukan negara Indonesia ini diwarnai silang pendapat dan perdebatan panjang.

Selain harus menghadapi Belanda di berbagai front pertempuran maupun meja perundingan, masa pemerintahan usai kemerdekaan RI kala itu juga terjadi gejolak internal. Ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Pada 1948, misalnya, terjadi aksi di Madiun dimotori oleh Musso. Peristiwa ini kerap disebut sebagai Pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada 18 September 1948.

Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Soekarno-Mohammad Hatta. Aksi lainnya dilakukan oleh Maridjan Kartosuwiryo pada 1949 atas nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Di Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

2. Masa Setelah Pengakuan Kedaulatan (1950-1959)

Setelah melalui rangkaian perundingan dan polemik bersenjata yang dituntaskan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdiri sendiri pada 27 Desember 1949.

Menjadi negara yang berdaulat justru membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil lantaran banyak munculnya masalah internal, baik dari kabinet maupun ancaman disintegrasi bangsa.

Purwoko melalui penelitiannya berjudul "Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi, menuliskan, dalam kurun waktu 9 tahun, yakni 1950-1959, pemerintahan Indonesia (kala itu bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS) mengalami 7 kali perombakan kabinet.

Di berbagai wilayah, pada periode ini muncul gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan negara. Sebut saja pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Andi Azis, Republik Maluku Selatan (RMS), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah, dan lainnya.

Pada masa ini pula militer mulai menjadi faksi yang kuat dalam perpolitikan Indonesia dan berperan besar dalam proses transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

3. Masa Akhir Orde Lama (1959-1966)

Periode 1959-1966 diwarnai dengan sistem Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usai terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.

Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya, sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden.

Lewat Dekrit Presiden 1959 pula, Soekarno membubarkan Konstituante. Konstituante adalah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru negara yakni UUD 1945 yang sebagian masih mengadopsi undang-undang kolonial. Dekrit Presiden 1958 mengembalikan konstitusi ke

UUD 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung (DPAS).

Demokrasi Terpimpin sejatinya merupakan konsep untuk membentuk ulang sistem pemerintahan yang kacau. Dengan menjadikan presiden sebagai titik sentral pemerintahan, Soekarno berharap dapat mencipta ulang stabilitas politik Indonesia waktu itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Dikutip dari tulisan bertajuk "Rantjangan Pendjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945" yang terhimpun dalam Buletin MPRS (1967), pelaksanaan Demokrasi Terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan UUD 1945. Pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat kedudukan presiden sangat kuat dan berkuasa, terlebih setelah mundurnya Hatta dari posisi wakil presiden sejak 1956. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30S 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. Tragedi G30S 1965 sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak 1966.¹

G30S PKI atau gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat hari ini (30/9), 56 tahun silam.

PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4 persen suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU.

¹ Rizal Amril Yahya. "Sejarah dan Penerapan Pancasila Masa Orde Lama Soekarno 1959-1966." <https://tirto.id/sejarah-dan-penerapan-pancasila-masa-orde-lama-soekarno-1959-1966-ghT9> Diakses tanggal 26 Juli 2021

Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh Sosialis Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau dikenal dengan Henk Sneevliet.

Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat.

ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam (SI). Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semaoen dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI.

Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaoen sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 yang ditulis oleh Harry A. Poeze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun, nama yang diusulkannya ditolak oleh Semaoen.

Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer.

Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni "If everything depends on the communist, we would follow the peaceful way (bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian)."

Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang.

G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya.

Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprpto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis, 30 September 1965 menuju hari Jumat, 1 Oktober 1965.

Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik enam orang perwira tinggi Angkatan Darat.

Enam Jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprpto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Di samping itu, gugur pula ajudan Menhankam/Kasab Jenderal Nasution, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean dan pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun.

Salah satu Jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah AH Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30S PKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072/Yogyakarta. Sedangkan Letnan Kolonel Sugiyono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta.

Secara umum, G30S PKI dilatarbelakangi oleh dominasi ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM) yang berlangsung sejak era Demokrasi Terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959-1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para Jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatarbelakangi pemberontakan G30S PKI.²

Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet.

1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis.
2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan.

² Kristina. "G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya." <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5747435/g30s-pki-sejarah-tujuan-kronologi-dan-latar-belakangnya> Diakses tanggal 30 September 2021

3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis.
4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis.
5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.

Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. Johannes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Waperdam I Dr Subandrio, dan Waperdam III Chaerul Saleh.[6] Leimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.

Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk meminta izin menghadap presiden. Segera setelah mendapat izin, pada hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga.

Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.

Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.³

Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia.

Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura.

Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam Gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966. Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan

³ Abdillah. "Isi Supersemar – Latar Belakang, Pengertian, Sejarah, Kontroversi." <https://rumusrumus.com/isi-supersemar/> Diakses tanggal 9 Oktober 2020

membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR, dari orang-orang yang dianggap terlibat Gerakan 30 September.

Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas presiden, bukan sebaliknya. Di DPRGR sendiri, secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan. Soeharto juga memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.

Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1955, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut:

1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945.
6. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia.
7. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pernyataan Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.

Hasil dari Sidang Umum IV MPRS ini menjadi landasan awal tegaknya Orde Baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu

pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur Partai Komunis Indonesia.⁴

Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis Indonesia juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai.

Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku. Pada tanggal 30 September setiap tahunnya, pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini mengenai:

1. Hal positif apa yang didapatkan dari masa pemerintahan Orde Baru?
2. Hal negatif apa yang didapatkan dari masa pemerintahan Orde Baru?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Empiris (Yuridis sosiologis), penelitian dimulai dari berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh faktor non-hukum terhadap terbentuknya serta berlakunya ketentuan hukum positif.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Orde Baru

Periode Orde Baru (Orba) ini dimulai sejak tahun 1966, telah banyak terjadinya perubahan yang signifikan yang membuat banyaknya muncul-muncul berbagai referensi-referensi atau macam-macam peristiwa sejarah sejak dimulainya masa Orde

⁴ Dwi Erianto. "Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa." <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/parlemen-indonesia-dari-masa-ke-masa> Diakses tanggal 17 Oktober 2020.

Baru ini sampai pada akhirnya di tahun 1998. Pada periode Mei 1998 inilah sesungguhnya merupakan detik-detik terakhir kepemimpinan Presiden Soeharto, hingga akhirnya beliau mengumumkan “pernyataan berhenti” pada tanggal 21 Mei 1998.

B. Biodata Soeharto

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.⁵

Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.

Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran. Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

C. Perjalanan Soeharto dari Karir Militer Sampai Menjadi Presiden

Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan

⁵ Arsip Nasional Republik Indonesia. “SOEHARTO masa bakti 1966-1998.”
https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=2&presiden=suharto
tanggal 17 Mei 2006

Diakses

tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).

Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968.

D. Tujuan Pokok Pemerintahan Orde Baru Beserta Sisi Positif dan Sisi Negatif Masa Orde Baru

Banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita dapatkan sejak zaman periode Orde Baru ini. Entah pelajaran penting ini mempunyai nilai yang positif atau yang mempunyai nilai negatif.

Tetapi sebelum masuk ke bagian pelajaran penting dari zaman Orde Baru yang memiliki nilai positif dan negatif, kita perlu mengetahui apa tujuan sesungguhnya yang dimiliki saat pemerintahan Soeharto atau pemerintahan Orde Baru. Berikut ini merupakan beberapa tujuan pokok yang dimiliki pemerintahan pada masa Orde Baru:

1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali.
2. Penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia.

3. Menerapkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
4. Membangkitkan kembali kekuatan Bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.

Setelah kita mengetahui apa tujuan pokok dari pemerintahan masa Orde Baru, kita juga perlu tahu bahwa pemerintahan Orde Baru memiliki hal-hal positif diantaranya:

1. Pada tahun 1966 terjadi peningkatan Gross Domestic produk perkapita Indonesia dari \$70 menjadi \$100.
2. Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.
4. Angka pengangguran semakin menurun.
5. Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.
6. Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.
7. Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
8. Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
9. Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari Luar Negeri.

Adapun munculnya sisi negatif dari pemerintahan Orde Baru ini yang sangat-sangat dikenal oleh masyarakat, dikarenakan sangat merugikan:

1. Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.
2. Pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.
3. Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.

4. Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Tidak tersentuh pembangunan.
5. Banyak terjadi pelanggaran HAM.
6. Terjadi pengekan kebebasan pers dan berpendapat.
7. Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.
8. Muncul istilah petrus “penembak misterius”.

E. Pembahasan Lengkap Sisi Positif dan Sisi Negatif yang Muncul Saat Masa Orde Baru

Lalu setelah kita membaca dan mengetahui tujuan pokok Orde Baru, sisi positif, sisi negatif dari pemerintahan orde baru apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian sejarah pemerintahan Indonesia ini? Ya, pelajaran penting yang bisa kita dapatkan adalah terciptanya sebuah negara yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakatnya, lalu sebuah negara dapat menekan angka kemiskinan serta pengangguran yang marak terjadi saat periode sebelumnya yaitu saat Orde Lama. Lalu 3 kebutuhan penting yaitu Sandang, Pangan, Papan dapat terpenuhi dengan baik yang diperoleh oleh masyarakat.

Negara juga saat ini memunculkan program wajib belajar untuk seluruh rakyat Indonesia agar bisa menjadi orang yang terdidik, serta meningkatkan kualitas keamanan dan pertahanan negara dari serangan atau ancaman dari negara-negara lain. Tetapi penulis menemukan satu pelajaran penting yang terdapat dari sisi negatif Orde Baru, yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan serta berkaca pada diri sendiri adalah terjadinya pengekan terhadap kebebasan berpendapat.

Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998. Setelah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, mantan presiden Soeharto akhirnya meninggal dunia pada Minggu, 27 Januari 2006). Soeharto meninggal pada pukul 13.10 siang dalam usia 87 tahun.

F. Pelepasan Jabatan Kepresidenan Soeharto dan Mulainya Masa Baru Yaitu Masa Reformasi

Setelah masa Kepresidenan Soeharto atau yang biasa dikenal dengan Orde Baru, masuklah periode selanjutnya yaitu Periode/Masa Reformasi di Indonesia atau yang biasa disebut juga sebagai era pasca-Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto.

Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Mundurnya Presiden Soeharto dilatarbelakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya.

Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa tertembak mati dan memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri.

Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui UUD 1985 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden BJ Habibie disumpah untuk menjadi

penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke BJ Habibie dan terbentuk Era Reformasi.

Gerakan atau Era Reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia, karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun, sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah:

1. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997.
2. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ketujuh.
3. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan (buying time).⁶

Penulis mengaitkan dengan periode atau zaman sekarang yaitu banyak orang-orang bahkan mahasiswa yang “terdidik” serta “terpelajar” menggunakan kebebasan berpendapat sebagai ajang untuk mengata-ngatai pemerintah (dengan konsep perkataan kasar atau perilaku yang tidak beradab serta tidak bermoral untuk dicontoh) yang sedang berkuasa.

Menurut penulis tindakan seperti itu tidak dapat dibela dengan kalimat suatu “kebebasan berpendapat” karena kebebasan berpendapat itu sebenarnya ialah kebebasan untuk menyampaikan kritik serta solusi bukan ajang untuk mengata-ngatai pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu. Jadi penulis berharap kepada pembaca agar dapat membedakan dan menggunakan kebebasan berpendapat itu dengan sebaik-baiknya dan mengetahui cara menggunakannya serta berani bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat.

III. PENUTUP

⁶ Verelladevanka Adryamarthanino. “Reformasi Indonesia 1998: Latar Belakang, Tujuan, Kronologi, Dampak.” <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/20/144131779/reformasi-indonesia-1998-latar-belakang-tujuan-kronologi-dampak?page=all> Diakses tanggal 20 April 2021.

A. Kesimpulan

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Pemerintah Orde Baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Tekad awal Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila & UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan maka muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status QUO.

Hal ini menimbulkan akses – akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai – nilai pancasila & ketentuan – ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pelaksanaan pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya, kekuasaan kehakiman yang di nyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Sejak munculnya Gerakan Reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutan. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Reformasi hukum hendaknya dipercepat untuk dilakukan, karena merupakan suatu tuntutan agar siap menyongsong era ketertiban ekonomi dan globalisasi. Mahasiswa sebagai moral force telah memerankan diri dalam kehidupan bangsa dan negara sesuai kurun waktunya. Peran mahasiswa dalam reformasi telah ditunjukkan sebagai pelopor untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keberhasilan mahasiswa dalam mencetuskan reformasi seyogyanya tidak menjadikan mahasiswa tinggi hati. Reformasi pada hakekatnya belum sepenuhnya mencapai harapan, karena masih banyak yang memerlukan pelurusan, perbaikan, dan

akselerasi. Oleh karena itu, peran mahasiswa masih diharapkan sebagai pengawal dan pengontrol reformasi. Di samping itu, diperlukan partisipasi aktif dan proaktif mahasiswa dalam berbagai peran sosial untuk mengatasi persoalan bangsa dengan memanfaatkan kemampuan intelektualnya dan semangat kepemudaannya yang diiringi dengan kekuatan moral. Semangat kebangsaan para generasi muda calon penerus kepemimpinan bangsa harus selalu dipupuk dan ditumbuh kembangkan.

Berikut merupakan pelajaran penting dari sekian banyak pelajaran yang dapat diambil dalam, zaman atau periode masa Orde Baru. Pelajaran penting ini dapat kita rasakan sekarang dan di kemudian hari sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam mengembangkan struktur ketatanegaraan serta perilaku kita di masa ini dan masa yang akan datang. Momentum suksesi kepemimpinan nasional 1998 memberikan pelajaran bahwa alasan dan prosedur suksesi kepemimpinan menjadi sangat penting guna menjaga stabilitas nasional.

Dan lain dari itu momentum suksesi kepemimpinan nasional 1998 memberikan pelajaran penting bahwasannya semua hal yang terjadi tidak harus terus menerus diselesaikan dengan kekerasan ataupun pembunuhan. Bisa menggunakan dengan cara lain yaitu mediasi ataupun hukuman kurungan, hukuman penjara, serta hukuman bebas bersyarat (grasi).

Selanjutnya, dukungan regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan suatu pilihan politik yang sangat berani dan progresif, meskipun di kemudian hari dan hingga saat ini hal ini masih terus menjadi bahan diskusi yang tidak pernah mati.

Terwujudnya peradilan satu atap (one roof system) juga merupakan salah satu perkembangan ketatanegaraan yang sangat signifikan dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, karena terbukti selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa hal ini belum sempat diwujudkan oleh para penguasa dan ahli hukum pada masa sebelumnya.

B. Saran

Selama ini periode atau masa Orde Baru sangat buruk dalam penilaian yang dilakukan oleh citra masyarakat Indonesia maupun dunia. Tetapi tanpa banyak

disadari, justru ada dan banyak hal positif dan hal yang membangun yang dapat menjadi referensi manusia dari periode atau masa Orde Baru ini, dan semoga saja dari hal negatif periode atau masa Orde Baru ini kita dapat mengambil suatu contoh kebaikan-kebaikan yang bisa digunakan pada masa depan atau masa yang akan datang.

Lebih dari itu penulis sangat ingin mengucapkan kepada para pembaca dan penulis juga sangat berharap jika artikel ataupun jurnal publikasi ini dapat dibagikan ke banyak orang supaya orang-orang yang selama ini mempunyai pandangan buruk terhadap masa orde baru ataupun tidak dapat tercerahkan karena adanya artikel atau jurnal ini yang membahas pelajaran penting yang didapat dari masa orde baru.

Sehingga pembaca mengerti dan memahami bahwa selama ini yang dianggap buruk masyarakat, ternyata ada hal-hal positif di dalamnya dan bukan sekadar itu saja, penulis juga mengharapkan kepada pembaca sekalian untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, apa yang dialami oleh negeri ini sekarang mari kita perbaiki bersama-sama. Kita bisa dan sangat bisa serta boleh dan sangat boleh mengambil contoh ataupun masalah masalah yang terjadi di masa lalu untuk kita menjadikannya referensi agar suatu masalah di lain waktu yang muncul akan dapat teratasi dengan sangat baik.

Gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa berbagai dampak bagi bangsa Indonesia. Walaupun sudah terjadi dua belas tahun silam, dampak tersebut masih kita rasakan sampai saat ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dibawah ini akan diulas sedikit tentang dampak-dampak tersebut.

Ada berbagai dampak negatif dari reformasi 1998. Pertama, iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalah artikan makna dari demokrasi. Kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Ketiga, banyak demonstrasi yang seharusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi, justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Keempat, meningkatnya kerusakan di masyarakat. Itu semua karena pemerintahan pasca reformasi masih belum mampu

melaksanakan undang-undang sebagai mestinya sehingga belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek.

Namun reformasi juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Pertama, masyarakat yang sebelum era reformasi dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi, apalagi mengkritik pemerintahan, kini dapat menyampaikan aspirasi dan kritiknya tersebut dengan bebas. Kedua, derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat, karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Ketiga, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional, sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang semakin berkembang.

Reformasi memang telah membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Dampak utama dari reformasi adalah kebebasan kita dalam menyampaikan aspirasi tidak lagi dikekang seperti yang terjadi pada masa orde baru. Kita bebas menyalurkan aspirasi kita bagi pemerintahan, baik berupa pendapat maupun kritik. Namun perlu diingat, bahwa kebebasan dalam berekspresi tersebut harus tetap mengikuti norma-norma yang berlaku. Aspirasi yang kita sampaikan harus dapat berguna bagi kemajuan bangsa, jangan sampai malah memecah belah persatuan bangsa. Intinya, reformasi harus bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih demokratis, sebagaimana cita-cita dari reformasi itu sendiri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhamad Hisyam. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, 46.

Undang H. Kamaluddin. *Dinamika Politik di Indonesia, Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015, 190.

B. Artikel Jurnal Online

Rajab Budi. "Negara Orde Baru: Berdiri Di atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh". *Sosiohumaniora Journal of Social Sciences and Humanities*. Volume 52,

Nomor 3 (2004): 1-20. Diakses tanggal 27 Maret 2005. Doi: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5528.

C. Website

Anonim. “Masa Orde Baru – Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, Sejarah, Kebijakan.”

<https://www.mindautama.com/artikel/masa-orde-baru-pengertian-latar-belakang-tujuan-sejarah-kebijakan> Diakses tanggal 11 Agustus 2015.

Mia Sumiati. “8 Dampak Positif dan Negatif pada Masa Orde Baru Paling Terlengkap.”

<https://gurupkn.com/dampak-positif-dan-negatif-masa-orde-baru> Diakses tanggal 5 Desember 2018.

Rizal Amril Yahya. “Sejarah dan Penerapan Pancasila Masa Orde Lama Soekarno 1959-1966.”

<https://tirto.id/sejarah-dan-penerapan-pancasila-masa-orde-lama-soekarno-1959-1966-ghT9> Diakses tanggal 26 Juli 2021.

Verelladevanka Adryamarthanino. “Reformasi Indonesia 1998: Latar Belakang, Tujuan, Kronologi, Dampak.”

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/20/144131779/reformasi-indonesia-1998-latar-belakang-tujuan-kronologi-dampak?page=all> Diakses tanggal 20 April 2021.

Kristina. “G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya.”

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5747435/g30s-pki-sejarah-tujuan-kronologi-dan-latar-belakangnya> Diakses tanggal 30 September 2021.

Arsip Nasional Republik Indonesia. “SOEHARTO masa bakti 1966-1998.”

https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=2&presiden=suhatu Diakses tanggal 17 Mei 2006.